

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Ambiguitas kedudukan hukum Perusahaan Perseroan Daerah sebagai entitas bisnis Badan Usaha Milik Daerah terjadi karena pengaturan Perseroda sebagai badan hukum tidak terjadi harmonisasi aturan secara horizontal antara Undang-Undang Pemerintah Daerah dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang menimbulkan ketidakjelasan kedudukan Perusahaan Perseroan Daerah dimana pada satu sisi berada pada ranah hukum publik dan sisi yang lain berada pada ranah hukum privat. Hal ini mengakibatkan Perseroda sulit dalam mencapai tujuan pembentukannya. Deviden yang dihasilkan belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Sementara peningkatan PAD sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk kesejahteraan masyarakat sesuai prinsip otonomi daerah. Ambiguitas tersebut tampak pada pengaturan tentang bentuk badan hukum, modal pendirian, peranan pemerintah daerah serta pengelolaan dan pengendalian Perseroda. Perseroda yang sejak awal pembentukannya harus dikelola dan dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum privat, ternyata tetap diatur pengelolaannya dengan harus tunduk kepada hukum publik. Hal ini disebabkan karena saham Perseroda mayoritas dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan modal Perseroda bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Bentuk penataan ulang kedudukan hukum Perseroda yang sebaiknya dilakukan adalah melalui pengaturan bentuk hukum Perseroda, modal pembentukan, kewenangan kepala daerah serta pengelolaan dan pengendalian Perseroda harus sesuai dengan bentuk badan hukum Perseroda sebagai Perseroan Terbatas. Kemandirian Perseroda sebagai sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas tampak pada bentuk badan hukumnya berupa Perseroan Terbatas, modal pembentukan dan pendirian Perseroda yang berasal dari APBD akan menjadi modal Perseroda sebagai Perseroan Terbatas. Penataan ulang lain yang harus dilakukan adalah dalam hal pengaturan tentang luas lingkup kewenangan Pemerintah Daerah. Selain itu penataan ulang yang harus dilakukan adalah mengenai pengelolaan dan pengendalian Perseroda. Dengan demikian harus ada peraturan yang khusus mengatur Perseroda sebagai entitas BUMD yang dikelola secara privat. Pengelolaan Perseroda mengikuti prinsip *Business Judgement Rules* yang berakar pada prinsip *fiduciary duty* dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (prinsip GCG) dapat menyebabkan peningkatan keuntungan Perseroda. Selain meningkatnya keuntungan, pengelolaan Perseroda yang professional dapat mendatangkan kemanfaatan yaitu berupa kegiatan bisnis yang menopang usaha kecil dan menengah di daerah, menjadi penggerak kegiatan usaha yang belum diminati pihak swasta, memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, serta perluasan lapangan kerja dan terutama deviden Perseroda sebagai sumber PAD dapat berkontribusi kepada APBD yang oleh pemerintah daerah akan digunakan bagi peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu mewujudkan pemenuhan kebutuhan

materi warga masyarakat, pemenuhan kehidupan yang layak, mampu mengembangkan potensi diri serta dapat menjalankan fungsi sosialnya.

5.2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran penelitian yakni:

1. Disarankan kepada Pemerintah Pusat dan DPR, sebagai unsur penyelenggara negara perlu melakukan kajian terhadap kedudukan hukum Perseroda sebagai entitas bisnis berupa kajian tentang bentuk hukum, modal pembentukan, kewenangan pemerintah daerah serta pengelolaan dan pengendalian Perseroda agar memastikan kemandirian Perseroda sebagai badan hukum privat dalam rangka membentuk peraturan khusus mengenai Perseroda agar tidak terjadi ambiguitas yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakefektifan usaha Perseroda, sehingga tujuan pembentukan Perseroda berupa kesejahteraan sosial tidak tercapai.
2. Disarankan kepada Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan di daerah perlu memastikan bahwa dalam proses pendirian dan pembentukan Perseroda telah melalui proses kajian yang mendalam sesuai karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta dapat memastikan bahwa Perseroda telah dikelola secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku karena soal pengelolaan Perseroda masuk ke dalam ranah Hukum Privat.

3. Disarankan kepada komisaris Perseroda dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroda dilakukan secara tepat, akurat dan transparan sehingga baik *Shareholder* maupun *Stakeholder* dapat mengikuti perkembangan pengelolaan Perseroda. Hal ini dapat meningkatkan citra Perseroda sebagai badan usaha yang menjalankan bisnis secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
4. Disarankan kepada Direksi Perseroda agar dalam mengelola perusahaan dilakukan dengan itikad baik dan bertanggung jawab dengan berpedoman pada prinsip *fiduciary duty* serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) agar tercipta profesionalisme dan budaya perusahaan yang sehat sehingga Perseroda dapat meningkatkan deviden perusahaan yang bermanfaat bagi peningkatan PAD.
5. Disarankan kepada masyarakat untuk dapat bekerjasama sebagai mitra dari Perseroda guna mengembangkan bisnis yang dikelolanya agar para pihak memperoleh profit yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan penelitian mengenai model implementasi Prinsip *Limited Liability* dan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam pengelolaan Perseroda sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Atau dapat juga melakukan penelitian mengenai model tata kelola dan pengendalian Perseroda berbasis Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Prinsip GCG*) guna meningkatkan perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016
- Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2012
- A'an Efendi, Dyah Octorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, Penelitian Hukum Doktrinal, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- , Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang, 2016
- Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Adi, Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Adi, Isbandi Rukminto, Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Alexander Jebadu, Drakula Abad 21, Membongkar Kejahatan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba dan Ancamannya Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila, Ledalero-Anggota IKAPI, Maumere, 2020
- Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2001
- Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007
- Arifin P Soeria Atmadja, Pola Pikir Hukum (*Legal Mindscapes*), Definisi Keuangan Negara Yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Mengakar (*Deep Rooted Bussines Practice*), Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2011
- , Pola Pikir Hukum (*Legal Mindscapes*) Definisi Keuangan Negara Yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Mengakar (*Deep Rooted Bussines Practice*), Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2011
- , Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum. Teori Praktik, dan Kritik, Universitas Indonesia Press, 2005
- Asep Mulyana, *Business Judgment Rule*, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan dalam Pengelolaan BUMN/BUMD, Grasindo, Jakarta, 2018

- Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM, Yogyakarta, 2012
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum*, Yogyakarta, 2005
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Cetakan Ketiga, Bandung, 2009
- Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Diterjemahkan Sigit Jatmiko, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2014
- Brigham, E. F., J. Houston, *Financial Management*, Edisi 10, Jilid 1, Alih Bahasa Ali Akbar Yulianto, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2004
- Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*, Fokusmedia, Jakarta, 2016
- Chamsyah, Bachtiar, *Penataan Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*, Trisakti University Press, Jakarta, 2010
- Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1991
- C.S.T. Kansil, Christine S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES*, Jakarta, 2006
- Darmawati, D., Khomsiyah, *Hubungan Corporate Governance dan kinerja perusahaan, The Indonesian Institute for Corporate Governanve IICG, Simposium Nasional Akuntansi VII*, 2004
- Desca Putra Yana dan Dian Puji N. Simatupang, *Pertanggungjawaban Direksi PT. Pertamina Dalam Dugaan Persekongkolan Tender Yang Dilakukan oleh BUMN*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014
- Dwijowijoto Riant R., Wrihatnolo, Randy R., *Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan*, Cetakan ke 2, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2005
- Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2011
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama Anggota Ikai, Bandung, 2018
- Fernando M. Manullang, *Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis*, Jurnal Veritas Et Justitia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Volume 5, Nomor 2, 2019
- Frans Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika (Sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19)*, Kanisius, Yogyakarta

- Gunawan Nachrawi, BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat, Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis dan Yuridis, Cendikia Pers, Bandung, 2021
- Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Hadi Prabowo, Dadang Suwanda, Wirman Syafri, Inovasi Pelayanan Pada Perusahaan Publik, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2022
- Hari S. Malang Juedo, Penataan BUMD, Kunci Sukses Mengembangkan BUMD Produktif dan Profesional, Elexs Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006
- Halim, Abdul, Theresia Damayanti, Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP YKPN, Yogyakarta, 2012
- Harlen Sinaga, Batas-batas Tanggung Jawab Perdata Direksi, Adinata Mulia, Jakarta, 2012
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Dan Manajemen Otonomi Daerah, Lukman Offset, Yogyakarta
- Hendra Setiawan Boen, Bianglala *Business Judgment Rule*, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, 200
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Cetakan Kedua Belas, Djambatan, Jakarta, 1999
- , Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: bentuk-bentuk perusahaan, Cetakan ke 10, Djambatan, Jakarta, 2005
- Ife, Jim, Frank Tesoriero, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi (*Community Development*), Tiara Wacana, Yogyakarta, 2009
- Imam Nawawi, Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek ekonomi dan Sosiologi, ITS Press, Surabaya, 2009
- Imam Syaukani Dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, 2015
- Iman Toto K. Rahardjo dan Herdiato WK, Bung Karno Dan Ekonomi Berdikari, Kenangan 100 Tahun Bung Karno, Grasindo, Jakarta, 2001
- Ismail Nawawi Uha, Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja, Kencana Pramedia Group, Jakarta, 2013
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Harapan, Jakarta, 2004
- Ismail Koto, Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1, SiNTESa, e-ISSN: 2797-9679
- Ismail Sholihin, Pengantar bisnis pengenalan praktis & studi kasus kencana, Prenada media Grup, 2006
- James Midgley, Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial, Deperta Depag RI, Jakarta, 2005
- Janpatar Simamora, Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, Cetakan Pertama, Capiya Publishing, Yogyakarta, 2013

- Janus Sidabalok, Berhan Simarmata, Pokok-pokok Hukum Ekonomi Indonesia, Bina Media Perintis, Medan, 2006
- Jimly Asshidiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, 2010
- , Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Rajawali Perss, Jakarta, 2012
- , Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- , Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi, Jurnal Hukum Projioris, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2013
- , M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2021
- Jony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2006
- Khairul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta, 2004
- Kurniawan, Hukum Perusahaan, Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Kusnu Goesniadhei, Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Nasa Media, Malang, 2010
- Loekman Soetrisno dan Faraz Umaya, Liberalisasi ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Manuel Kaesiepo, Pancasila dan Keadilan Sosial: Peran Negara, dalam prosiding Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila, Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas, FISIP UI Depok, 31 Mei 2006, Brighten Press, Bogor, 2006
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Miles, Mattew B., Amicael Huberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rosihi, Univerisitas Indonesia, Jakarta, 2017
- Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- , Doktrin-Doktrin Modern dalam *Corporate Law* dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- , Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mustamim Matutu, Selayang Pandang tentang Perkembangan Tipe-tipe Negara Modern, FHPM UNHAS
- Mohammad Suud, Harsono, 3 orientasi kesejahteraan sosial, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana: Perenada Media Group, Jakarta, 2013
- Purwadi, *Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, 2002
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Jakarta, 2004
- Rachmani Puspitadewi, *Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum*, Unpar Press, Bandung, 2017
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi – Cetakan ke 13*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018
- Rustian Kamaluddin, *Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*, Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri dan Otda, Jakarta, 2000
- Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015
- Siti Sumartini, Nurwahyuni, Saeful Kholik, *Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern*, Jurnal Suara Hukum, Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan ke-3, Edisi Revisi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- , *Hukum Dagang, Cetakan Kelima*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Setiawan, *Model Pelayanan Publik yang Berkeadilan: Studi Empirik pada PDAM Kota Surakarta*, Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008
- Setiawan R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2002
- Siahaan, Rondang M., *Tanggung Jawab Sosial Instansi Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Biro Perencanaan Departemen Sosial RI, Jakarta, 2011
- Simarmata, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Universitas Paramadina, Jakarta, 2008
- Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, ed., *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, UI Press, Jakarta, 1992
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- , *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cetakan ke lima, Liberty, Yogyakarta, 2008

- Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013
- Suradi, *Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial (Economic Growth And Sosial Welfare)*, Jurnal Informasi, Volume 17, Nomor 3, 2012
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011
- Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014
- Widjaja HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Yesnil Anwar, Adang, *Pembaruan Hukum: Reformasi Hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008
- Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD*, Intrans Publishing, Solo, 2017
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016
- Zaman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Universitas Brawijaya (UB) Press, Malang, 2011

Jurnal Ilmiah

- Adji Suradji Muhammad, Irman, Asmaul Husna, Eka Suswaini, *Re-Organisasi Badan Usaha Milik Daerah: Upaya Meningkatkan Kemandirian Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi, STIA LAN, Volume 17, Nomor 1, Juni 2020
- Ahmad Basofi Dwi Budi Santoso, *Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang, 2017
- Ali Imron, *Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulasari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*, Jurnal Riptek, Volume 6, Nomor 1, 2012
- Amanda Savira Karin, *Problematika Status Kekayaan Negara Dalam Permodalan Bumn Persero*, Business Law Review, Volume 3, Tahun 2017
- Ambar Budhisulistiyawati, Yudho Muryanto, dan Anjar Sri CN, *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik*, Jurnal Privat Law, Volume III, Nomor 2, Juli-Desember 2015
- Antari, Sedana, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah*, E-Jurnal Manajemen Unud, Volume 7, Nomor 2, 2018
- Anis Ni'am Imana, *Implementasi Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011-2016*, Jurnal Al-Intaj, Volume 5, Nomor 2, 2019

- Asep Warlan Yusuf, Artikel Kehormatan: Hukum dan Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Volume 2, Nomor 1, 2015
- Atip Latipulhayat, Hans Kelsen, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 1, Universitas Padjajaran, 2014
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta, 2005
- Catharina Dewi Wulansari, Dimensi Baru Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24, Nomor 3, 2006
- Christiana Vanessa Sengkey, Kajian Hukum Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Lex Administratum, Volume VI, Nomor 1, 2018
- Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Warmadewa, Volume 12, Nomor 2, 2018
- Dian Cahyaningrum, Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD (*The Implication of Regional Owned Enterprises Legal Form to its Management*), Jurnal Negara Hukum, Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2018
- Daryanto, Eksistensi BUMD dalam Otonomi Daerah, Majalah BUMN Link, Volume I, Nomor 1, Tahun 2012
- Deddy Cahyadi, Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia, Artikel Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2017
- Djumardin, Legalitas Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT. Daerah Maju Bersaing), Jurnal Jatiswara, Volume 33, Nomor 3, November 2018
- Dora Kusumastuti, Wibowo Murti Samadi, Perubahan Perusahaan Daerah Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Research Fair Unisri, Volume 3, Number 1, Januari 2019
- Dura, J., Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan sosial masyarakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, LP3M STIE Asia, Malang, Volume 10, Nomor 2, 2016
- Dwijowijoto Riant R., Wrihatnolo, Randy R., Manajemen Pembangunan Indonesia: Sebuah Pengantar dan Panduan, Cetakan ke 2, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006
- Djumardin, Legalitas Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT. Daerah Maju Bersaing), Jurnal Jatiswara, Volume 33, Nomor 3, November 2018
- Dyah Hapsari Prananingrum, Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum, Jurnal Refleksi Hukum, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2014
- Edi Suharto, Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?, Makalah Seminar Nasional Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2006

- , Negara Kesejahteraan Dan Penataan Depsos, Makalah Seminar yang bertajuk “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia”, MMUGM, 2006
- Edi Wibowo, Implementasi *Good Corporate Governance* Di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Universitas Sriwijaya, Volume 10, Nomor 2, Oktober 2010
- Eddy Sugiarta. Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya. Jurnal Eksekutif. Volume 4, Nomor 2, 2017
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019
- Elli Ruslina, Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, *Quo Vadis* Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019
- Fauzi Syam, Elita Rahmi, Arsyad, Eksistensi dan Konstruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Pasca Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014, Undang: Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2018
- Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Perspektif, Volume 11, Nomor 3, 2016
- Hari Harjanto Setiawan, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial, Jurnal Sosio Informa: Kajian Pemasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Volume 3, Nomor 3, 2017
- Habibul Umam Taqiuddin, Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan, Volume 1, Nomor 2, November 2017
- Ibnu Sam Widodo, Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Jurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 4, Nomor 1, 2021
- , Amelia Ayu Paramitha, Kedudukan Tap MPR Dalam Teori Dan Praktik Ketatanegaraan, Jurnal Majelis, Edisi 12, Desember 2019
- I Ketut Mardjana, *Corporate Governance dan Privatisasi*, Jurnal Reformasi Ekonomi, Volume 1, Nomor 2, 2002
- Ikhsan Lubis dan Neneng Oktarina, Perlindungan Hukum Terhadap Direksi yang diberhentikan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham, Jurnal Unes Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018
- Ina Nurhayati, Ulasan tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Jurnal Mimbar Hukum, 2015
- Inda Rahadiyan, Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 20, Nomor 4, Oktober 2013

- Jojob Dwiridotjahjono, Penerapan *Good Corporate Governance*: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 5, Nomor 2, Center for Business Studies. FISIP–Unpar, 2009
- Jony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2006
- Khairul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Khasazah, Friedrich Karl Von Savigny, Jurnal Ilmu Hukum, Padjadjaran, Volume 2, Nomor 1, 2015
- Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 1, Februari 2014
- Latif, Yudi, Pembukaan Undang-Undang Dasar Sebagai Cita Negara dan Cita Hukum, Jurnal Ketanegaraan, 2016
- Lestariningsih, Peranan Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengembangan Perusahaan Publik, Jurnal Spirit Publik, Volume 4, Nomor 2, 2008
- Luigi, L. D., Vecky, A. J., Patrick, Analisis Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 17, Nomor 1, 2017
- Made Gde Subha Karma Resen, Yudho Taruno Muryanto, Implikasi Yuridis Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Di Indonesia, Yustitia Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2014
- Madaskolay Viktoris Dahoklory, Dinamika Pengelolaan Keuangan Bumn Perihal Dilema” Antara Kerugian Negara Ataupun Kerugian Bisnis, Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 3, Desember 2020
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Mastur Mastur, Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Dampaknya Terhadap Hukum Dan Perubahan Sosial, Qistie-Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2015
- M. Iqbal Asnawi, Implikasi Pengelolaan BUMN Persero Dalam Kerangka *Welfare State* Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016
- Mudemar A. Rasyidi, Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9, Nomor 1, September 2018
- Muhtadi, Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia, Jurnal Fiat Justitia, Lampung, Universitas Lampung, Volume 5, Nomor 2, Desember 2012
- Muryanto, Djuwityastuti, Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance, Yustisia Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2020
- Mohammad Suud, Harsono, 3 orientasi kesejahteraan sosial, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006

- Nasir, Muhammad Safar, Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 2, Nomor 1, 2019
- Nurmiati, Fina Diana, Murbayani, Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, dan Sosial Humaniora Universitas Indonesia Timur*, Volume 1, Nomor 1, 2019
- Nurul Ni'matul Usriyah, Dica Dara Ayuningtyas, Susi Hardjati, Peran BUMD Dalam Meningkatkan PAD Kota Surabaya, *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2020
- Oman Sukmana, Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), *Jurnal Sospol*, Volume 2, Nomor 1, 2016
- Osborne, D. and Gaebler, T., *Penataan Government*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1992 dalam Suhartono, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik BUMD: Studi Di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan, *Jurnal Kajian*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2011
- Pahlefi, Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Volume 7, Nomor 2, 2012
- Peni, Emilia, Sami Vahamaa, *Did Good Corporate Governance Improve Bank Performance During the Financial Crisis?*, Retrieved December, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Rahayu Sulistiowati, Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonomi Baru (DOB), *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 16, Nomor 3, November 2014
- Ryan Surya Perdana, Wewenang Kepala Daerah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd), *Jurnal Hukum Peratun*, 2019
- Samsul Arifin, Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Membangun Ekonomi Untuk Menghadapi Era Globalisasi, *Jurnal Dinamika*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2007
- Siti Sumartini, Nurwahyuni, Saeful Kholik, Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern, *Jurnal Suara Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
- Suhartono, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik BUMD: Studi Di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan, *Jurnal Kajian*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2011
- Sulistiowati dan Veri Antoni, Konsistensi Penerapan Doktrin *Piercing The Corporate Veil* Pada Perseroan Terbatas Di Indonesia, *Jurnal Yustisia* Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2013
- Suradi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial (*Economic Growth And Sosial Welfare*), *Jurnal Informasi*, Volume 17, Nomor 3, 2012

- Sufriadi, Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Yuridis, Volume 1, Nomor 1, 2014
- Sutan Remy Sjahdeni, Pengembangan Fungsi Pengawasan Menuju Good Corporate Governance pada Milenium baru, Makalah disajikan pada Seminar yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI), Graha Sucofindo, Jakarta, 1999
- , Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001
- Surahman, Asri Lasatu, Asriyani, Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah, Bilancia, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, IAIN Palu, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020
- Suwardi dan Prasetyo, Efisiensi Teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Jasa Produksi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 1, Nomor 11, 2019
- Sri Widastuti, Politik Hukum BUMD dalam Kegiatan Bisnis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Law & Justice Jurnal, E-Issn. 2549-8282, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Volume 4, Nomor 1, April 2019
- S. Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal Criksetra, dalam ejournal.unsri.ac.id, 2016
- Taufik, Eksistensi *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah, Jurnal Relasi, STIE Mandala Jember, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015
- Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia, Jurnal Business Law Review, Volume 1, Nomor 3, 2017
- Teuku Ahmad Yani, Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan sosial masyarakat (Studi Pembentukan Perusahaan Daerah Di Aceh), Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 56, Edisi April 2012
- Udiyo Basuki, Hukum, Ekonomi dan Kesejahteraan: Telaah Yuridis Atas Dinamika Pengaturan dan Implemenasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dalam I-Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum, Issn. 2302-7355, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Volume 2, Nomor 1, Juni 2014
- Wahyu Nugrono, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Panca sila, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3, Edisi September 2013, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta
- W Meliala, Menuju Good Governance Dengan Penataan Government, Jurnal Citizen Education, Volume 2, Nomor 2, Juli 2020
- Widyastuti A., Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja Dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009, Economics Development Analysis Journal, Volume 1, Nomor 2, 2012
- William Lam, Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Saham yang Dikaitkan dengan Asas Hukum Terang dan Tunai, Repository UIB (Universitas Nasional Batam), 2018

- Varly Verari Maneking, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 7, September 2016
- Vincentius Wintara Putra, Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia, *Agora*, Volume 2, Nomor 2, 2014
- Yahya Harahap, *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, Nomor 3, 2007
- Yoyo Arifardhani, Kemandirian Badan Usaha Milik Negara: Persinggungan Antara Hukum Privat Dan Hukum Publik, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2019
- Yudho Taruno Muryanto, Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance, *Jurnal Yustitisa*, Volume 3, Nomor 1, 2014
- Zainal Asikin, Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019
- , Lalu Wira Pria Suhartana, Usman, Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN, *Jurnal Kompilasi Hukum, Jurnal Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2019
- Zhaudiva Azzahra Putri, Rahayu Subekti, Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, Nomor 1, 2022
- Zudan Arif Fakrulloh, Analisis Yuridis Dan Empiris Terhadap Implementasi Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Perspektif, Kajian Sosiologis dan Pendidikan, Universitas Negeri Padang*, Volume 9, Nomor 3 Tahun, 2003

Artikel Ilmiah

- Abdul Sani, Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya dalam <http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi/>
- Adiguna Bimasakti, Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah, <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>
- Arifin, Peranan Akuntan Dalam Menegakan Prinsip GCG Pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan), Disampaikan Pada Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar, 2005
- Ajeng Dyah Aps, Peranan United Nations Development Program (UNDP) Dalam Pencapaian *Millennium Development Program* (Mdgs) Di Indonesia, dalam <https://repository.unair.ac.id/14713/>.
- Annisa Nur Fitriana, Tata Kelola dalam <https://blog.ub.ac.id/annfr12/2019/05/15/resume-dynamic-governance/>.

- Arief Budijanto, Menyambut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam <https://bappedalitbang.probolinggota.go.id/2016/04/menyambut-Undang-Undang-23-tahun-2014/>
- Arif Afandi, Pengelolaan BUMD Harus Profesional, Majalah Kabupaten Report, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2015, dalam <https://www.slideshare.net/bobbyumbara/majalah-kabupaten-report-52340275>
- Baren Sipayung, Penyesuaian Bentuk Badan Usaha BUMD Pasca PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, dalam <https://www.researchgate.net/publication/331988649>, 2018
- Bismar Nasution, Hukum Kegiatan Ekonomi, Book Terrace & Library, Bandung, 2007, hlm.205, dalam Darwin Nasution, Pengaturan Bentuk Dan Pengelolaan BUMD Perseroda Sebagai Badan Hukum Yang Ideal Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah, dalam <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26213>.
- Boediono, Dimensi Ekonomi-Politik Pembangunan Indonesia, dalam pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada Tanggal 24 Februari 2007
- Budi Mulya, Transformasi BUMN Menjadi Lokomotif Ekonomim Nasional, dalam <https://www.jawapos.com/opini/07/10/2021/transformasi-bumn-menjadi-lokomotif-ekonomi-nasional/>
- Buyung Syafei, Sekali Lagi Tentang Sistem Perekonomian, dalam <http://deroe.wordpress.com/>, 2009
- Darwin Nasution, Pengaturan Bentuk Dan Pengelolaan BUMD Perseroda Sebagai Badan Hukum Yang Ideal Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah, dalam <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26213,2019>
- D. Harmantyo, Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia, Seminar Nasional dan PIT – IGI, 2011, dalam https://www.researchgate.net/publication/43198950_Pemekaran_Daerah_dan_Konflik_Keruangan_Kebijakan_Otonomi_Daerah_dan_Implementasinya_di_Indonesia.
- Detanti Asmaningayu Pramesti, Akibat Hukum Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Eksistensi Jaminan Aset Badan Usaha Milik Daerah, dalam <https://repository.unair.ac.id/96685/4/4.%20BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, 2019
- Dyah Permata Budi Asri, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, dalam <http://janabadra.cic.id/ujb/00-2411-7401-pdf>
- Djadjuli, R. D. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2018, dalam [peren emerintahan dalam Otda.pdf](#)
- Donie Tuah Tifriano Putra, Tata Kelola Dinamis Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dalam <http://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/docId/24055>.
- Edi Suharto, Negara Kesejahteraan Dan Penataan Depsos, Makalah Seminar yang bertajuk Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, dilaksanakan di Wisma MMUGM, 2006

- , Peta Dan Dinamika Welfare State Di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?, Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta, 2006
- Eko Yulianto, BUMD: Potret Buram Perusahaan Daerah, dalam <https://ekojulianto.tripod.com/articles/bumd.htm>
- Emir Chairullah, Wapres: Tingkat Kesejahteraan Rakyat Indonesia Masih Timpang, dalam <https://mediaindonesia.com/ekonomi/451847/wapres-tingkat-kesejahteraan-rakyat-indonesia-masih-timpang>
- Fai, Teori-Teori Kesejahteraan Sosial, dalam <https://fisip.umsu.ac.id/2021/12/01/teori-kesejahteraan-sosial>.
- Hartanto, Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan di Indonesia, Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, 2019, dalam <https://ejournal.widyamataram.ac.id/>
- Ibrahim R, Landasan Filosofis Dan Yuridis Keberadaan BUMN; Suatu Tinjauan, Jurnal Hukum Bisnis, dalam <http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jhb/article/view/1491>, 2012
- I Ketut Westra, Kedudukan Hukum Perusahaan Daerah Sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam <http://prasetya.ub.ac.id/berita/11109-id.html/> 2012.
- Jimly Asshidiqie, M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Setjen & Kepaniteraan MK-RI, dalam https://www.google.com/www.pusdikmin.com%2Fperpus%2Ffile%2FTEORI_HANS_KELSEN_TEN_TANG_HUKUM.pdf&usg, 2006
- Lastuti Abubakar, Imamulhadi, Kajian Hukum Pengaturan Perusahaan Daerah Balikpapan, <http://pustaka.unpad.ac.id/wp/2013>
- Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*), dalam <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/403/283>, 2015
- Muhammad Adiguna Bimasakti, Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah, Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Dalam <https://Ptun-Makassar.Go.Id/Batasan-Tindakan-Dalam-Hukum-Administrasi-Pemerintahan-Dan-Perbuatan-Dalam-Hukum-Perdata-Oleh-Pemerintah/>, 2023
- Muhammad Guntur Ramadhan, Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Menjalankan Fungsi Pemegang Saham Bumd (Studi Pada Pt. Bank Kalbar Di Pontianak), Jurnal Hukum Magister, Universitas Tanjungpura, dalam <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/21128>.
- M. Jafar, Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Daerah Dengan Karakter Konvergensi Antara Hukum Privat Dengan Hukum Publik Dan Perkembangannya, dalam <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/400>, 2016

- Nn, Entitas Bisnis dalam Konsep Legal, <https://www.pengadaan.web.id/2019/11/entitas-bisnis-adalah.html>
- Nn, Peranan Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah, Tulisan Hukum/Bpk Perwakilan Provinsi Banten/Umum Dalam <https://Banten.Bpk.Go.Id/>
- Novi Muharrami, Stranas Pemberantasan Korupsi Untuk Pengelolaan BUMD Yang Lebih Baik, dalam <https://kalbarprov.go.id/berita/stranas-pemberantasan-korupsi-untuk-pengelolaan-bumd-yang-lebih-baik.html>.
- Nurmiati, Fina Diana, Murbayani, Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Seminar Nasional Sains, Teknologi, Dan Sosial Humaniora Uit, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UIT (Universitas Indonesia Timur – Makasar), 2019
- Owen E. Hughes dalam Lastuti Abubakar, Imamulhadi, Kajian Hukum Pengaturan Perusahaan Daerah Balikpapan, http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/pustaka_unpad_kajian_hukum_pengaturan_perusahaan/2013.
- Rahayu Sulistiowati, Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonomi Baru (DOB), Jurnal Sosiohumaniora, Volume 16, Nomor 3, November 2014: 270, dalam [Http://Journal.Unpad.Ac.Id/Sosiohumaniora/Article/Viewfile/5767/3090](http://Journal.Unpad.Ac.Id/Sosiohumaniora/Article/Viewfile/5767/3090)
- Reydonnyzar Moenek, Problematika, Peluang, Tantangan dan Strategi Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD, paparan pada Rakernas Revitalisasi BUMD, Pemantapan Penerapan PPK-BLUD, dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2015
- Riawan Tjandra W., Pemisahan Kekayaan Negara di BUMN, 2014 dalam <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>.
- Risca Noor Syamsiah, Tanggungjawab Negara Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat Yang Layak, Dalam Epository.Unpas.Ac.Id/14869
- Salmyda Novitri Esperiana, Upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program Ekowisata Berbasis Masyarakat, Universitas Indonesia, dalam <https://lib.ui.ac.id/>.
- Shidarta, Sekilas Suatu Tawaran Metode Kajian (Penafsiran) Filosofis Terhadap Undang-Undang dalam <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/14/penafsiran-filosofis/>, 2019
- Shindih Hersiva Emilia, Pertanggungjawaban Pemegang Saham Berdasarkan Piercing The Corporate Veil Di Indonesia, Dalam <https://www.Google.Com/Repositori Usu.Ac.Id>.
- S. Safitri, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal Criksetra, dalam ejournal.unsri.ac.id, 2016
- Sitti Mawar, Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum, dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/>

- Surahman, Asri Lasatu, Asriyani, Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah, *Bilancia*, Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, IAIN Palu, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020, dalam <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/578/404>
- Timbul Sahala Tua Hutabarat, Budaya Dan Etika Organisasi Publik/Bisnis dalam <http://repository.ut.ac.id/5039/1/fekonisip>
- Triwahyuningsih, Mengukuhkan Negara Hukum Pancasila, Seminar Nasional: Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Reformasi, ISSN 2598-6384, dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/2017>
- Turiman Fachturahman Nur, Terobosan Hukum Memajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dala Era Otonomi Daerah, *Rajawali Garuda Pancasila*, dalam <Http://Rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/04/Terobosan-hukum-memajukan-badan-usaha.Html>.
- Vanya Karunia Mulia Putri, Pembagaian Pendekatan Dalam Ilmu Ekonomi, Pendekatan Ilmu Ekonomi Positif Dan Normatif, dalam <https://kmp.im/plus6>
- William Lam, Tinjauan Hukum Mengenai Jual Beli Saham yang Dikaitkan dengan Asas Hukum Terang dan Tunai, *UIB (Universitas Nasional Batam) Repository*, 2018

Naskah dan Dokumen

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2021, dalam <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/04/2686334262dc4b968afec56f/statistik-keuangan-badan-usaha-milik-negara-dan-badan-usaha-milik-daerah-2020.html>

Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Termiskin di Indonesia Yang Memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terendah pada Tahun 2022

Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang BUMN, Badan Keahlian DPR RI, Mei 2021

[Kementerian Badan Usaha Milik Negara](#), Jumlah BUMD 2023 dalam *bumn.go.id*

Kementerian Dalam Negeri, Kementaian Dalam Negeri Dukung Optimalisasi BUMD dalam <https://koran.tempo.co/read/info-tempo/480807/kementerian-dalam-negeri-dukung-optimalisasi-bumd#:~:text=Saat%20ini%20jumlah%20BUMD%20sebanyak,BUMD%20milik%20pemerintah%20kabupaten%20Fkota>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/ambiguitas>

Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun 2022, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Laporan Ekonomi Dan Fiskal Daerah: Capaian Dan Tantangan Pembangunan, LPEFD Edisi XXX, Agustus 2022, dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/?portfolio=lpefd-edisi-xxx>

TOR Naskah Akademik tentang Badan Usaha Bukan Badan Hukum, Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_badan_usaha.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah